

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
KELAS II
JULI 2020**

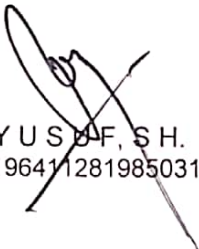
LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI JULI 2020 DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada Hari Senin, 29 Juli 2020

Ketua Tim Survei, /


Y U S U F, S.H.
NIP. 196411281985031005

Megetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,



Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR ISI

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud Dan Tujuan..... 1

1.3. Landasan Hukum..... 2

1.4. Rencana Kerja.....2

BAB II.....4

METODOLOGI.....4

2.1. Metode Penelitian.....4

2.2. Populasi Dan Sampel.....4

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis..... 4

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control..... 4

2.5. Teknik Analisis Data..... 5

2.6. Tahapan pelaksanaan.....5

BAB III.....8

INDEKS PERSEPSI KORUPSI..... 8

3.1. Profil responden.....8

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....12

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan..... 22

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan..... 23

BAB IV..... 24

PENUTUP..... 24

4.1. Kesimpulan..... 24

4.2. Rekomendasi..... 24

LAMPIRAN.....26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 13 Juli – 17 Juli 2020 dan data disebar sebanyak 60 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana sejumlah 60 responden dari 60 responden yang disebarkan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggung jawab survei yang akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

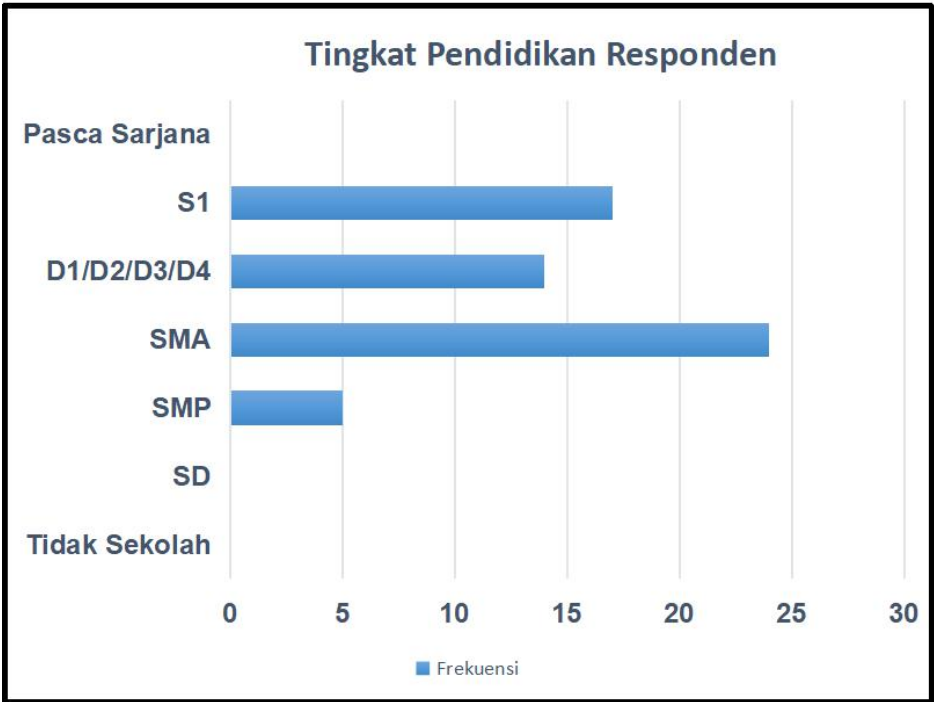
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar SMA sebanyak 24 (40%) responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	5	8,33
4	SMA	24	40
5	D1/D2/D3/D4	14	23,33
6	S1	17	28,34
7	Pasca Sarjana	0	0
JUMLAH		60	100

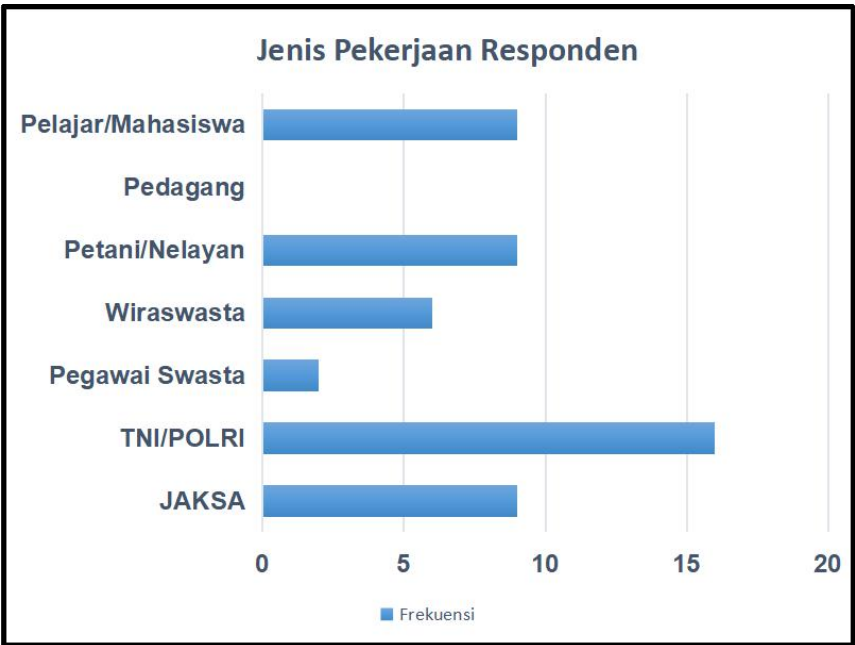


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 16 (26,67%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki pekerjaan sebagai TNI/POLRI.

Tabel 5.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	JAKSA	9	15
2	TNI/POLRI	16	26,67
3	Pegawai Swasta	2	3,33
4	Wiraswasta	6	10
5	Petani/Nelayan	9	15
6	Pedagang	0	0
7	Pelajar/Mahasiswa	9	15
8	Advokat	7	11,67
9	Guru	0	0
10	Honor	0	0
11	PNS	2	3,33
JUMLAH		60	100



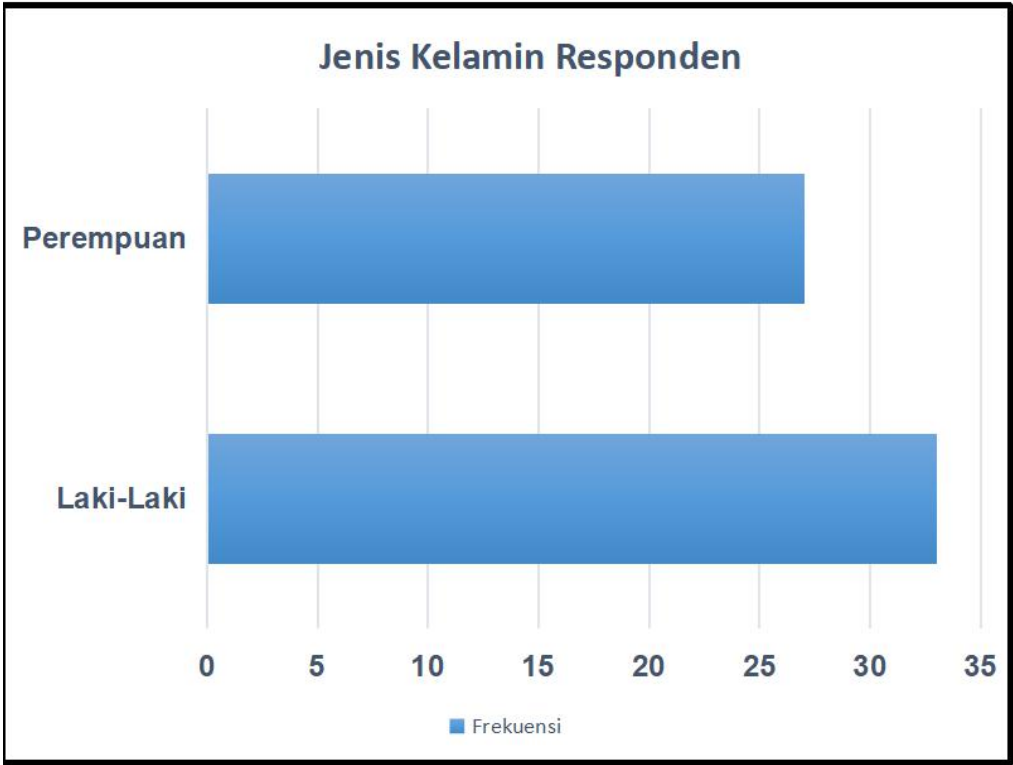
3.1.3. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 33 (55%) responden.

Tabel 6

Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	33	55
2	Perempuan	27	45
JUMLAH		60	100

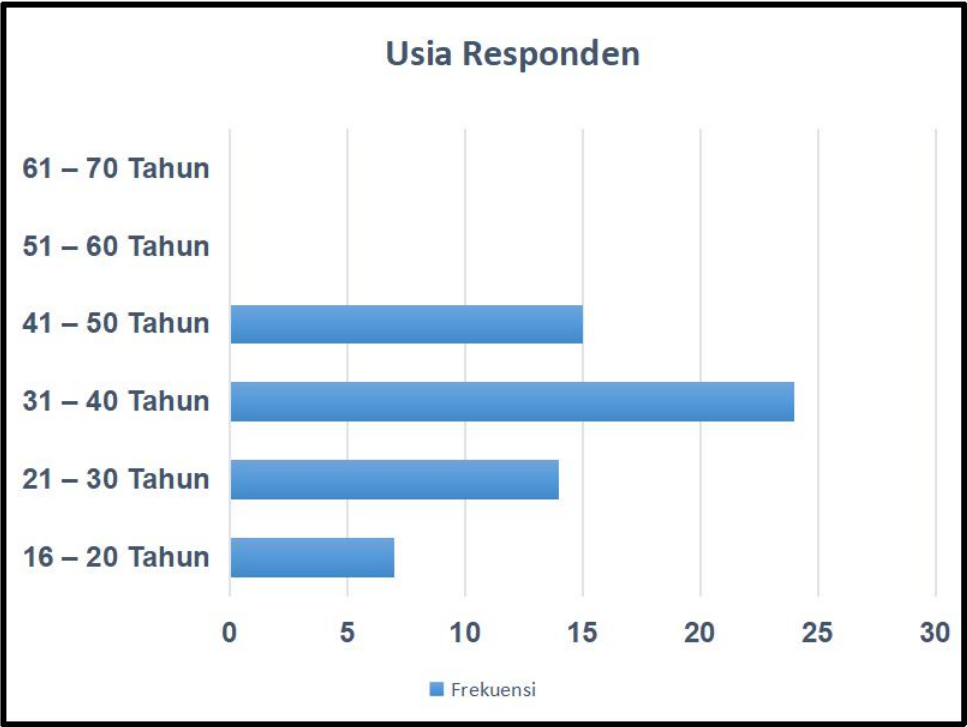


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun dengan jumlah 24 (40%) responden.

Tabel 7
USIA RESPONDEN

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	16 – 20 Tahun	7	11,67
2.	21 – 30 Tahun	14	23,33
3.	31 – 40 Tahun	24	40
4.	41 – 50 Tahun	15	25
5.	51 – 60 Tahun	0	0
6.	61 – 70 Tahun	0	0
Jumlah		60	100



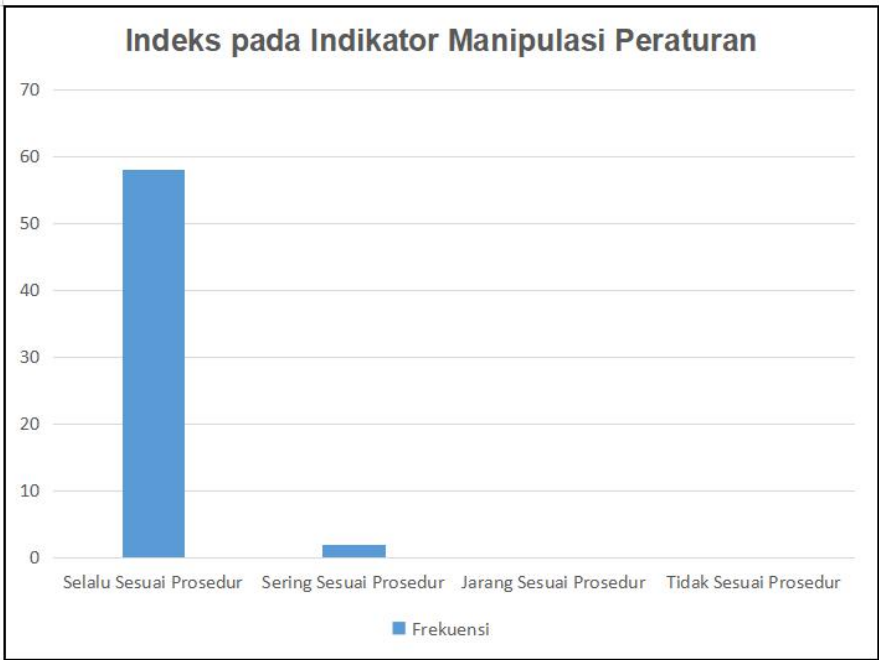
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “58 (96,67%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu Sesuai Dengan Prosedur (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,96” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	58	96,67
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	2	3,33
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

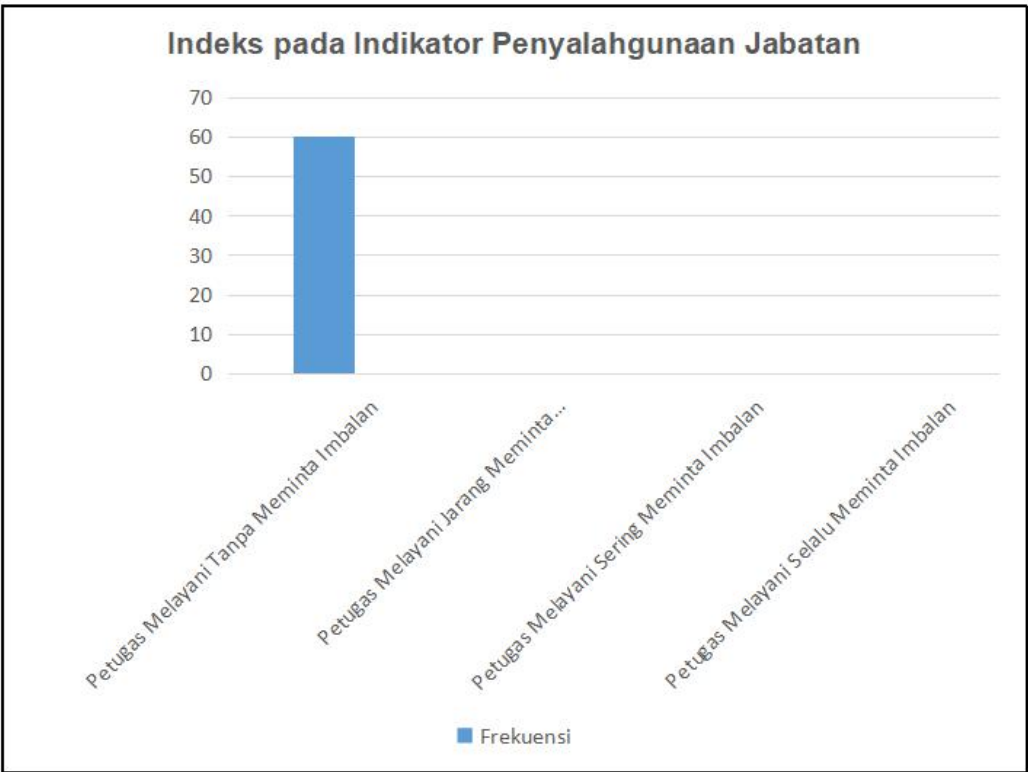


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“60 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	60	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

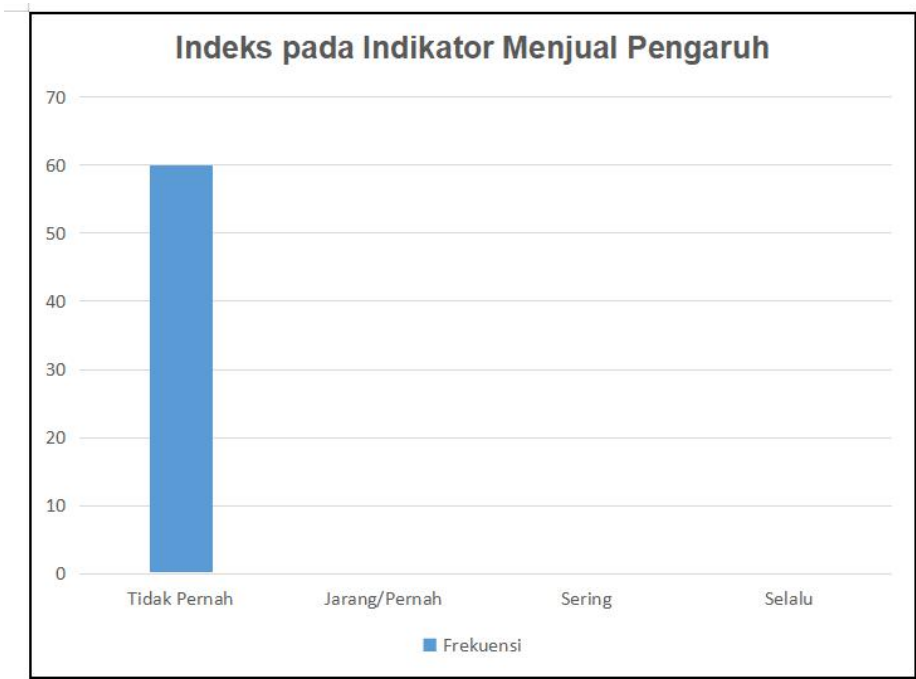


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**60 (100%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Pernah (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**4**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	60	100
2	Jarang/Pernah	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

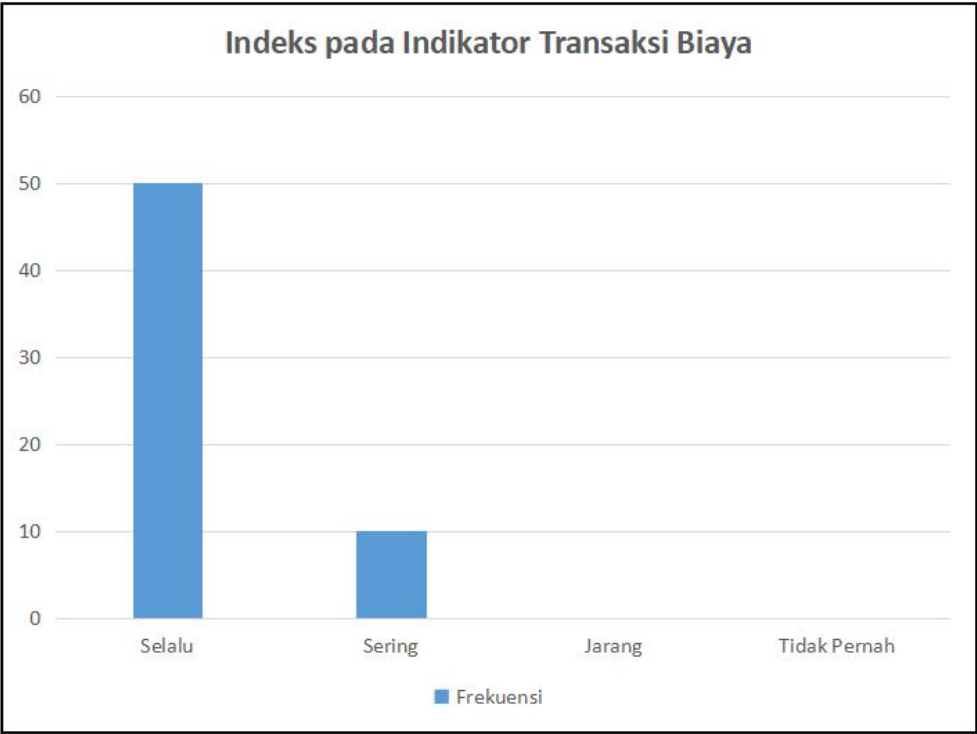


3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “50 (83,33%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,87” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 12.
Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	50	83,33
2	Sering	B	3	10	16,67
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

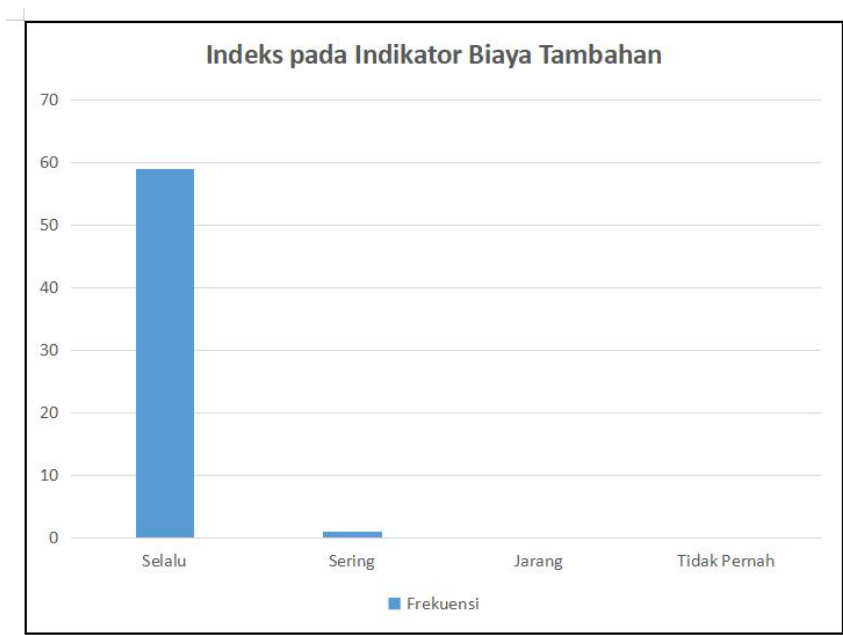


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**59 (98,33%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**3,98**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	59	98,33
2	Sering	B	3	1	1,67
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

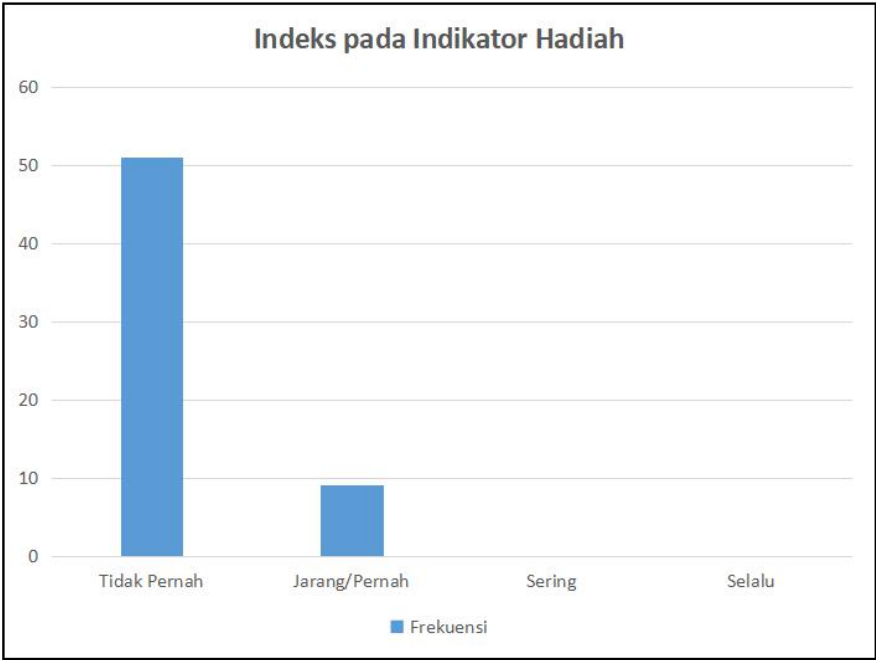


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan “51 (85%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Pernah (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,84” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 14.
Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	51	85
2	Jarang/Pernah	B	3	9	15
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

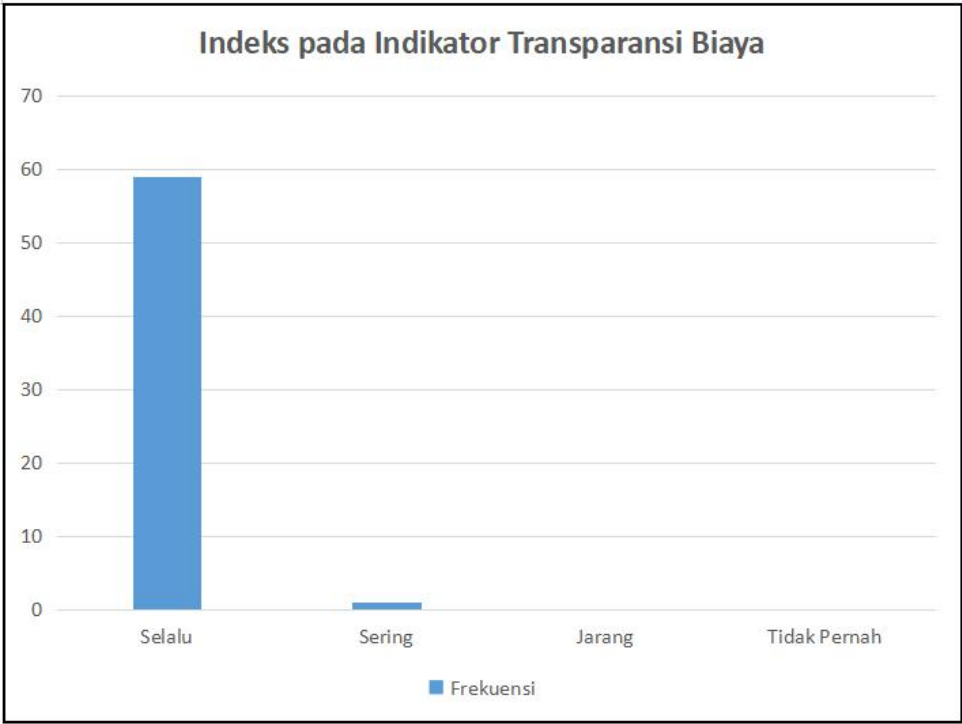


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**59 (98,33%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**3,98**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 15.
Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	59	98,33
2	Sering	B	3	1	1,67
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

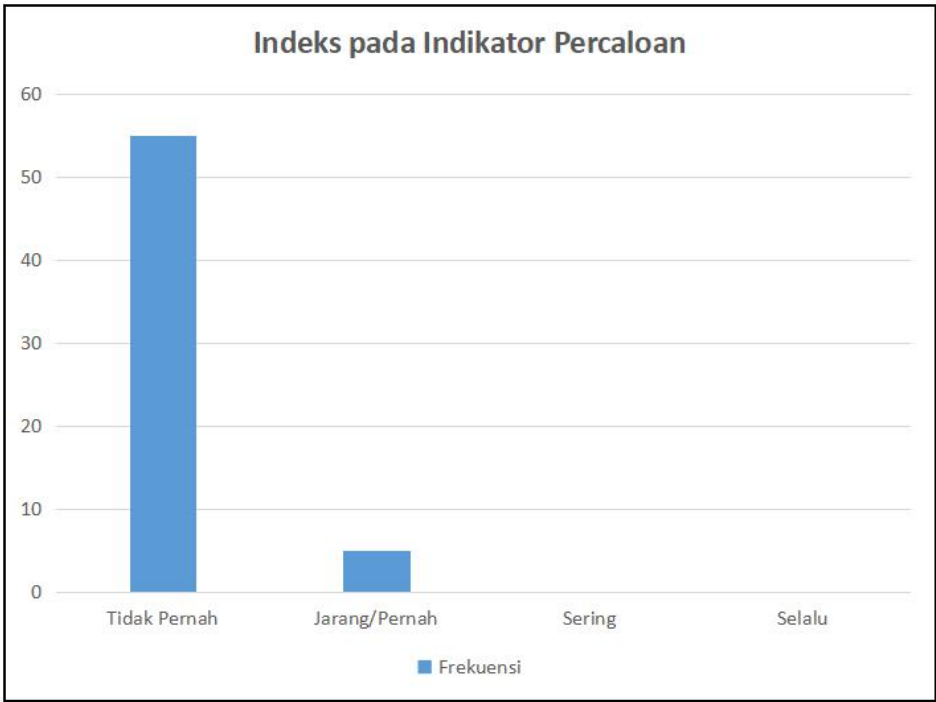


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“55 (91,67%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,89”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	55	91,67
2	Jarang/Pernah	B	3	5	8,33
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				60	100



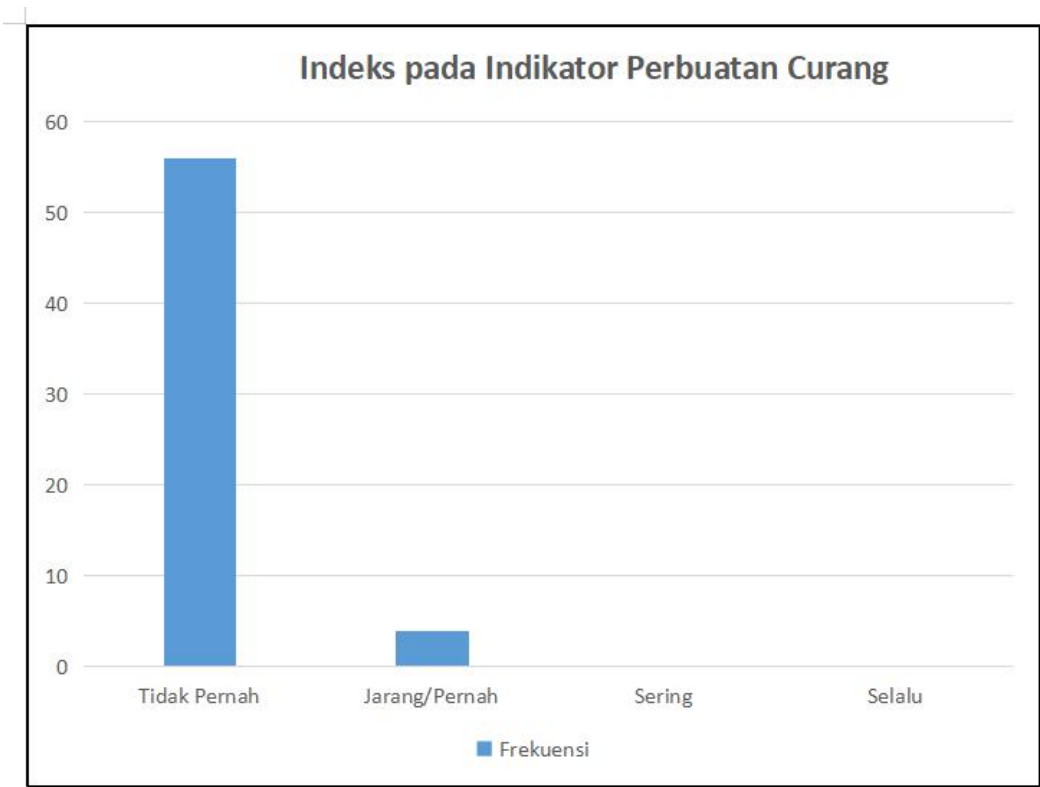
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**56 (93,33%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Pernah (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**3,93**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Bersih dari Korupsi**”.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	56	93,33
2	Jarang/Pernah	B	3	4	6,67
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				60	100

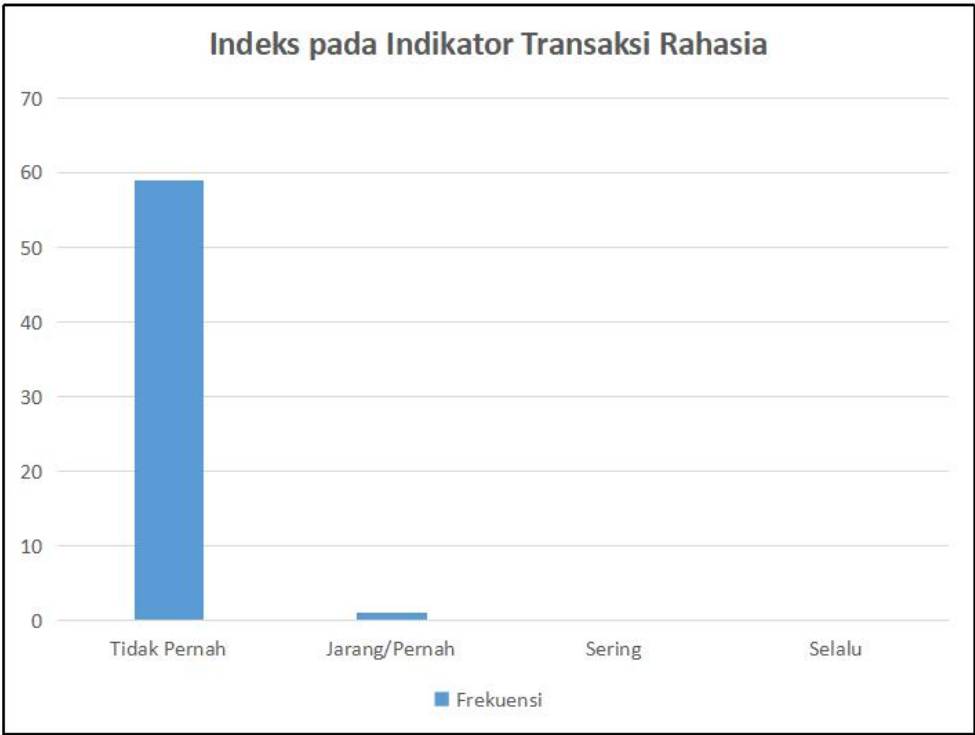


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“59 (98,33%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Pernah (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	59	98,33
2	Jarang/Pernah	B	3	1	1,67
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				60	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar “98,5”.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA – RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	3.96	0.40	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan	4,00	0.40	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	4,00	0.40	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3.87	0.39	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3.98	0.40	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3.84	0.38	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3.98	0.40	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3.89	0.39	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3.93	0.39	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	4.00	0.40	Bersih dari korupsi
Jumlah Skor Rata – Rata Tertimbang			3.94	
IPK			3.94 x 25 = 98,5	

Indeks “98,5” tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “BERSIH DARI KORUPSI”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka “81.26 – 100.00”

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **“98,5”** atau masuk pada kategori **“Bersih Dari Korupsi”**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,96 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,87 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,84 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,89 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,93 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator

memiliki indeks dengan persepsi kategori Bersih Dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Ket.
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

28	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
29	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
35	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
58	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	178	180	180	174	179	173	179	175	177	180	

N.Rata-rata	3.96	4.00	4.00	3.87	3.98	3.84	3.98	3.89	3.93	4.00		
												1
NRR Tertimbang	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.38	0.40	0.39	0.39	0.40	3.94	10
												0.1